

Moderasi Beragama dari Toba bagi Indonesia: Potret Tantangan, Hambatan, dan Strategi Mewujudkannya

Agnes Novianti Permata Sari

Pendidikan Penyuluh Agama, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Indonesia.

E-mail: agnesnoviantih@gmail.com

Alamat: Jalan Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara

Korespondensi penulis: agnesnoviantih@gmail.com

Abstract. Religious moderation is essential for building a harmonious and tolerant society amid religious diversity. This study aims to assess the success of religious moderation programs in Toba district, which is home to various religious communities. The research focuses on the challenges hindering public understanding of religious moderation and explores ways to enhance awareness and implementation. Using a qualitative method, data were collected through interviews and direct observations. The findings indicate a need for broader understanding among Toba residents regarding the values of religious moderation. Socialization and training efforts should be directed toward local Ministry of Religious Affairs staff, religious instructors, and involve religious and traditional leaders to effectively disseminate the message of moderation. Support from the central Ministry of Religion—particularly in providing equitable budget allocations to regional offices—is also crucial for the successful implementation of the program. A structured and collaborative approach is necessary to ensure that the message of religious moderation reaches all levels of society and contributes to the maintenance of interreligious harmony.

Keywords: Religious Moderation, The Challenge of Religious Moderation, Barriers to Religious Moderation, Religious Moderation Strategy.

Abstrak. Moderasi beragama merupakan kunci penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan saling menghormati di tengah perbedaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberhasilan program moderasi beragama di Kabupaten Toba yang memiliki keberagaman agama. Fokus utama terletak pada tantangan yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep moderasi beragama serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Toba memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai moderasi beragama. Diperlukan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat Kementerian Agama daerah, penyuluh agama, serta pelibatan tokoh adat dan agama untuk menyampaikan pesan moderasi secara menyeluruh. Dukungan dari Kementerian Agama pusat, khususnya dalam bentuk anggaran yang merata ke daerah, juga sangat penting untuk keberhasilan program ini. Implementasi yang terstruktur dan kolaboratif akan memperkuat penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai moderasi dan menjaga kerukunan antarumat beragama.

Kata kunci: Moderasi Beragama, Tantangan Moderasi Beragama, Hambatan Moderasi Beragama, Strategi Moderasi Beragama.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai masyarakat beranekaragam baik dalam hal kondisi sosial etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Hal ini membuat Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman dan keberagaman itu menjadi ciri khas dan sumber keunikan negara tersebut. Agama merupakan salah satu aspek keberagaman di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan enam agama resmi yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Selain itu, pemerintah juga membina agama suku atau yang disebut aliran kepercayaan suatu masyarakat.

Selain sebagai ciri khas negara, Keragaman memiliki potensi untuk menimbulkan benturan antar budaya, ras, etnis, kepercayaan, dan nilai-nilai kehidupan. Benturan ini yang dapat membuat keretakan dalam persatuan yang sudah diciptakan negara melalui landasan negara yaitu Pancasila dengan moto Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi satu jua). Kemajemukan atau pluralisme juga dapat dijadikan sebagai strategi dalam politik identitas atau pertikaian yang muncul di Indonesia. Suryan A. Jamrah mengatakan bahwa agama memiliki kemampuan untuk memutuskan tali persaudaraan dan memecah belah persatuan secara umum.

Agama sesungguhnya ada bukan untuk menciptakan konflik namun memberikan ajaran, nilai-nilai, dan norma-norma yang baik bagi masyarakatnya namun ada kepentingan yang membuat agama sebagai alat pemecah pemersatu bangsa yaitu munculnya gerakan radikalisme agama yang menolak ajaran lain yang tidak sesuai dengan ajarannya (perbedaan doktrin), perbedaan suku dan ras pemeluk agama, perbedaan mayoritas dan minoritas, adanya tindakan kekerasan terhadap orang yang berbeda agama dan kerusuhan di tempat ibadah umat beragama, serta beberapa faktor lainnya. Hal inilah yang membuat timbulnya konflik atau perpecahan antar umat beragama.

Kebebasan beragama di Indonesia untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, pemerintah mendukung pembangunan keagamaan dan kehidupan umat beragama. Kementerian Agama RI giat Menyosialisasikan moderasi beragama. Lukman Hakim Saifuddin, yang menjabat sebagai Menteri Agama RI periode 2014 hingga 2019 mencetuskan ungkapan tersebut, bahwa tahun 2019 merupakan Tahun Moderasi Beragama. Moderasi beragama bertujuan untuk menghentikan keyakinan, sudut pandang, dan perilaku keagamaan yang ekstrem seperti terorisme, kekerasan, dan ujaran kebencian.

Kata moderasi berasal dari kata *moderation* yaitu sebuah kata sifat yang disebut moderat yang berarti tidak berlebihan atau berada di tengah. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan, atau penghindaran keekstriman. Maka, ketika kata moderasi disatukan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, berarti merujuk kepada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama.

Literasi moderasi beragama menurut Joni Tapingku adalah dengan memberikan pengajaran mengenai sikap dan usaha menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindari perilaku ekstrem atau radikal serta mencari jalan tengah yang menyatukan semua elemen kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Mengenai moderasi beragama di Indonesia, ada dua hal yang ingin disampaikan. Pertama keberagaman adalah fakta dan kedua adalah mengutamakan sikap moderasi dan menghindari sikap radikal.

Keadilan dan keseimbangan adalah prinsip dari moderasi beragama. Keadilan diartikan berpihak pada kebenaran, sedangkan keseimbangan mengacu pada cara pandang, sikap, dan keyakinan yang selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Untuk mengamalkan moderasi beragama, seseorang tidak boleh eksklusif (tertutup), melainkan inklusif (terbuka), berbaur, dan beradaptasi dengan berbagai budaya.

Moderasi agama menolak radikalisme karena radikalisme adalah sifat ekstrem yang tidak melihat hal toleransi dalam umat beragama. Radikalisme berasal dari Bahasa latin “*radix*” yang artinya akar, dasar, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan dan sangat sulit untuk menuntut perubahan, hal ini bisa kita lihat dari KBBI. Sedangkan menurut kemenag radikalisme berarti (1) gerakan atau filosofi politik radikal (2) paham atau aliran yang memerlukan revolusi atau regenerasi sosial dan politik yang keras atau radikal; (3) Pandangan politik radikal.

Moderasi beragama menghasilkan toleransi di setiap perbedaan antar umat beragama hal ini dilihat dari isi indikator moderasi adalah toleransi. Kata toleransi berasal dari bahasa Latin, “*tolerare*” yaitu sabar terhadap sesuatu. Jadi toleransi adalah cara berpikir atau bertindak yang mematuhi aturan, dan memungkinkan seseorang untuk menghargai tindakan orang lain. Dalam konteks sosiokultural dan teologis istilah “toleransi” mengacu pada sikap dan perbuatan yang melarang diskriminasi terhadap kelas atau kelompok sosial lain, seperti toleransi dalam beragama, ketika agama yang dominan dalam suatu masyarakat memberi ruang bagi agama lain untuk hidup dilingkungannya.

Intoleran pernah terjadi di kabupaten Toba, peristiwa itu terjadi di kecamatan Pintu Pohan Sumatera Utara. Peristiwa yang terjadi adalah penolakan salah satu pembangunan masjid bagi kaum muslim, agama muslim termasuk agama yang minoritas di Kabupaten Toba. Hal ini perlu diperhatikan bahwa kesejahteraan umat beragama dalam hal beribadah dan

membangun tempat ibadah sangat diperlukan dan dihargai oleh setiap masyarakat beragama. Dari peristiwa ini dapat dikatakan bahwa pemerintah setempat dan masyarakat masih kurang mengetahui pemahaman moderasi beragama sehingga sifat menghargai kepada agama minoritas tidak dilaksanakan masyarakat agama mayoritas.

Kabupaten Toba adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia dengan ibu kota Balige. Kabupaten Toba memiliki 16 kecamatan, 13 kelurahan dan 231 desa, masyarakat yang tinggal di kabupaten ini dominan bersuku Batak Toba dan beragama Kristen Protestan. Salah satu kecamatan di Kabupaten Toba adalah Pintu Pohan Meranti yang dimana masyarakatnya sudah berbaur dengan masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang yang datang ke kecamatan tersebut adalah masyarakat suku Jawa, Melayu Deli dan Melayu Riau. Mereka datang dikarenakan merantau untuk mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Toba salah satunya juga dikarenakan adanya proyek pembangunan PLTA mengakibatkan banyak pendatang dan menetap disana. Berdasarkan dialog dengan penyuluh agama Kristen Toba permasalahan lainnya yang dilihat dalam masyarakat Toba adalah keadaan nyaman yang sudah tercipta dalam lingkungan mayoritas Kristen di kabupaten tersebut, mengakibatkan timbul sikap dan respon yang tidak teralu terbuka dengan keberadaan agama lain, seolah-olah menyatakan bahwa Kabupaten Toba adalah rumah dan milik dari masyarakat Toba dan beragama Kristen (bersikap etnosentrisme).

Kerukunan umat beragama sangat diperlukan untuk mengurangi konflik akibat perbedaan yang ada dan salah satu untuk meningkatkan kerukunan umat beragama adalah masyarakatnya sadar akan moderasi beragama. Dengan mengetahui moderasi beragama secara baik maka konflik, perselisihan, radikalisme, terorisme, radikalisme serta permasalahan agama lainnya akan tidak terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang beragam agama.

Dengan latar belakang diatas, maka tulisan ini membahas tentang bagaimana program moderasi beragama dapat sukses di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang beragam agama khususnya di kabupaten Toba. Tulisan ini juga melihat tantangan dan hambatan penyebab masyarakat Toba kurang mengetahui konsep atau pemahaman moderasi beragama Tulisan ini mencoba mendiskripsikan bagaimana moderasi beragama membentuk pola pikir masyarakat Batak Toba untuk hidup rukun dengan perbedaan yang ada dan memberikan solusi dalam menyukseskan program moderasi beragama.

2. KAJIAN TEORITIS

Salah satu jabatan fungsional di Kementerian Agama Republik Indonesia adalah penyuluh agama. Penyuluh agama merupakan ujung tombak pemerintah Kementerian Agama dalam menyampaikan pesan-pesan agama dan pesan dari program pemerintah. Penyuluh agama merupakan pembimbing umat beragama dalam pembinaan mental, akhlak, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 791 tahun 1985, penyuluh agama adalah pembimbing yang membantu umat beragama untuk dibina kejiwaannya, moral, dan ketaqwaan kepada Tuhan.

Keberadaan penyuluh agama dapat dipandang sebagai agen yang mampu membangun struktur sosial, hal ini dapat dilihat dari teori strukturisasi. Melalui praktik/tindakan yang berulang-ulang kegiatan penyuluh agama akan menjadi contoh dan aktor di masyarakat umum. Sebagai agen, penyuluh agama akan menumbuhkan rutinitas sehari-hari yang tidak hanya memberi rasa aman tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengelola kehidupan sosial mereka secara efektif.

Naskah akademik Kementerian Agama Republik Indonesia menguraikan tentang kemampuan dasar yang diperlukan oleh para penyuluh agama untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Kemampuan dasar itu adalah: 1) Kemampuan untuk menggunakan dan menerapkan variabel-variabel dan isu-isu penting bagi vitalitas masyarakat (sebagaimana fungsinya dilakukan, misalnya isu demografus, masalah ekonomi, pelayanan manusia, lingkungan dan masalah lainnya) kemudian kemampuan memakai dan mempraktekkan variabel-variabel dalam memprioritaskan program perencanaan dan penyerahan proses aksi sosial. 2) rasa memiliki terhadap berbagai budaya, asumsi multi-budaya, norma, kepercayaan, dan nilai, atau keragaman budaya merupakan dari kesadaran, komitmen dan kemampuan. 3) Kapasitas untuk merencanakan, merancang, melaksanakan, mengevaluasi, menghitung dan memasarkan program penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup sasaran penyuluhan atau pemograman bidang penyuluhan. 4) Kapasitas untuk mengenali, memahami dan memfasilitasi peluang dan sumber daya yang diperlukan sebagai cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan masyarakat binaan (keterlibatan). 5) Menerapkan teknologi dan metode penyuluhan untuk mendukung program penyuluhan dalam membimbing perubahan perilaku kelompok sasaran penyuluhan, menguasai keterampilan berkomunikasi baik lisan dan tulisan. 6) Kapasitas untuk berinteraksi secara efektif dengan berbagai individu dan kelompok dalam rangka menjalin kerjasama, membangun jaringan dan menciptakan sistem yang dinamis. 7) Pengetahuan sejarah, filsafat dan karakteristik dari penyuluhan (pengetahuan tentang

organisasi). 8) kemampuan untuk secara positif mempengaruhi individu, berbagai kelompok binaan atau pengelola organisasi penyuluh. 9) Kapasitas untuk menentukan struktur, mengatur proses, pengembangan, memantau sumber daya serta memimpin perubahan untuk mencapai hasil penyuluhan secara efisien dan efektif. 10) Kemampuan untuk menunjukkan perilaku yang mencerminkan kinerja penyuluh yang tinggi, etos kerja yang kuat, dan komitmen untuk pendidikan berkelanjutan sesuai visi, isi dan tujuan penyuluh untuk meningkatkan efektivitas individu dan organisasi (profesionalisme).

Berdasarkan uraian di atas, para penyuluh agama dapat berperan dalam menyukseskan program moderasi beragama yang mendorong kerukunan umat beragama. Para penyuluh melakukan penyuluhan moderasi beragama kepada masyarakat binaan mereka masing-masing dengan bersikap secara moderat. Penyuluh harus merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan sebagai bagian dari penyuluhan mereka, serta memantau dan mengevaluasi program moderasi beragama.

3. METODE PENELITIAN

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metodologi kualitatif, yang meliputi bacaan dari literatur, observasi, dan wawancara. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah penelitian yang lebih menekankan pada makna. Sedangkan jenis penelitian deskriptif berfokus pada penggambaran atau deskripsi fenomena yang ada, termasuk fenomena alamiah dan buatan.. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis kondisi dari hal yang diteliti dari informasi informan. Pengolahan data yang disajikan deskriptif yang diperoleh dari sumber data kemudian data dianalisis dengan triangulasi data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Moderasi Beragama

Asal kata moderasi beragama dari kata *moderation* yaitu pertengahan dan tidak condong ke kiri maupun ke kanan dan tetap di posisi tengah, dari hal tersebut orang yang moderat pemikirannya tidak berlebihan. Perekat antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa adalah moderasi beragama. Di Indonesia beragama pada hakikatnya adalah ber-Indonesia dan ber-Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Dalam istilah agama moderasi dikenal dengan kata *wasat* atau *wasatiyah*, kata ini dipahami dari bahasa Arab dan pelakunya disebut wasit. Ada berbagai definisi wasit yaitu penengah, pelantara dan pelerai.

Untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama maka moderasi beragama harus dipraktikkan. Untuk mengelola situasi keagamaan yang sangat majemuk di Indonesia seperti

yang telah diuraikan di atas, diperlukan suatu visi dan solusi yang dapat menumbuhkan kerukunan dan perdamaian dalam praktik beragama, khususnya dengan memberlakukan moderasi beragama untuk menghormati keragaman interpretasi dan menghindari intoleransi, radikalisme, atau ekstremisme. Menemukan titik temu dan jalan damai dua kutub ekstrim dalam beragama merupakan strategi dari semangat bermoderasi agama.

Ada 4 indikator dalam keberhasilan moderasi beragama yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti kekerasan dan 4) kesesuaian dengan budaya lokal. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengetahui moderasi beragama dipraktikkan di lingkungan masyarakat. Penerimaan terhadap nilai-nilai kebangsaan yang tertuang dalam UUD 1945, konstitusi dan regulasi dibawahnya disebut dengan komitmen kebangsaan. Menghargai perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk memilih keyakinan yang dianut, mengekspresikan keyakinan yang dianut, mengungkapkan pikiran dan mau bekerjasama adalah pilar-pilar toleransi. Ketika seseorang atau sebuah kelompok menggunakan kekuatan fisik atau bahasa kasar untuk mencapai hasil yang diinginkan, anti kekerasan dapat dikatakan menolak perilaku mereka. Dan yang terakhir adalah masyarakat menerima tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaan mereka selama tidak bertentangan dengan inti ajaran agama. Hal ini disebut akomodatif terhadap budaya lokal (penerimaan tradisi).

Pemerintah desa, Kepala seksi (Kasi) dan penyuluh agama harus mengetahui pemahaman moderasi beragama ini dengan baik dimana di dalam lapangan penelitian masih banyak pemerintah desa, dan penyuluh agama yang masih belum mengetahui konsep atau isi dan indikator moderasi beragama. Pemerintah desa harus bekerja sama dengan kementerian agama setempat untuk melaksanakan program sosialisasi moderasi beragama kepada penyuluh sehingga penyuluh yang terjun kemasyarakat langsung mengetahui konsep moderasi beragama dengan baik dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Masyarakat yang sadar akan moderasi beragama akan mempunyai pola pikiran yang moderat sehingga menghasilkan pola hidup yang rukun dan saling menghargai. Dengan moderasi beragama masyarakat kabupaten Toba tidak berpikiran *ethnosentrisme* yang menganggap bahwa wilayah mereka hanya untuk masyarakat suku tuan rumah yaitu Batak Toba yang beragama Kristen namun mereka berpikir bahwa kabupaten Toba untuk semua masyarakat yang berbeda budaya dan agama tanpa adanya rasa termarginalisasi.

Moderasi Beragama Prespektif Kristen

Dari perspektif Kristiani, moderasi beragama dapat dimulai dengan sabda Yesus tentang hukum utama yang pertama, yaitu tentang kasih (Matius 22:39). Kasih adalah kesadaran manusia dan sifat bawaan yang tidak dapat dibedakan dari kehidupan manusia.

Manusia segambar dengan Allah, dengan cara yang sama bahwa sifat Allah penuh belas kasih, cinta dan Dia adalah kasih.

Ajaran Kristen tentang kasih dikenal sebagai Hukum Kasih. Esensi aturan ini tidak hanya mencangkup moralitas dan empati namun lebih banyak lagi karena kasih bersifat teologis. Dalam standar ini kepribadian Allah yang memandu manusia harus bekerja sama dan terhubung dengan sesama manusia lainnya. Menurut John Wesley, keselamatan yang diterima orang percaya akan mempengaruhi orang dalam kasih dan kasih berfungsi sebagai saluran keselamatan kepada orang yang belum mengenal keselamatan dari Allah.

Sifat-sifat Kristiani pada dasarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kunci dari hubungan sosial adalah “kasih”. Dari sudut pandang Kristiani moderasi beragama juga mencangkup kasih tanpa syarat untuk semua orang. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menuntut agar seluruh masyarakat Indonesia menghormati perbedaan yang ada. Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kekristenan adalah ajaran yang moderat.

Gagasan yang Yesus ajarkan dalam Matius 5:13 dan 14 tentang menjadi “garam dan terang dunia” adalah contoh dari moderasi beragama. Ayat tersebut berbunyi “ Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.” Saat tertimpa sinar matahari, garam yang putih mengkilap memancarkan lambang kesucian dan memberi rasa kepada banyak hal.

Oleh karena itu kekristenan dapat menumbuhkan pola pikir toleransi sehingga tidak boleh kehilangan identitas sebagai umat Tuhan yang menyalurkan dampak positif bagi sekitar lingkungannya. Moderasi beragama terlihat dalam sikap Yesus terhadap mentolerir orang asing ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Yohanes 4:9 menjelaskan bahwa kebiasaan dan kepercayaan orang Yahudi dianggap “tabu” untuk berbicara dengan orang Samaria dikarenakan kebudayaan pada saat itu. Namun Yesus meruntuhkan sikap intoleran orang Yahudi.

Kerukunan juga disebutkan dalam kitab Roma yaitu hidup dengan benar (harmonis) dan oleh iman. Paulus berurusan dengan fitnah dari persaingan “otoritas” Yahudi di Roma yang mendorong orang Kristen kembali ke hukum Torat (Roma 3:8). Pada keterangan tersebut Paulus telah membantah fitnah mereka dan membela pesannya tentang hidup dengan keyakinan terhadap Tuhan.

Dalam pasal 14, Paulus menguraikan apa artinya menjalani kehidupan yang benar melalui iman. Di sini dia membuat perbedaan antara orang Kristen yang memiliki iman yang

kuat dan orang Kristen yang memiliki iman yang lemah. Dia tidak ingin orang-orang Kristen dengan alasan iman jadi mendiskriminasi orang lain yaitu orang yang berbeda iman dengan mereka. Orang yang beriman kuat harus menerima orang yang lemah imannya.

Orang Kristen yang kuat imannya harus mendorong dan mengangkat orang ini dalam perjalanan mereka dengan Tuhan daripada memperdebatkan kelemahan orang lemah lainnya dengan menilai pendapat mereka. Weinata Sairin mengatakan bahwa sekelompok orang yang berwawasan sempit tidak boleh merusak kerukunan antar umat beragama. Paulus menggunakan contoh khusus dari abad pertama untuk Roma; Kisah Para Rasul 10;15 mengatakan bahwa melalui kemerdekaan Kristus, seseorang dapat makan apapun; mereka yang lemah, sebaliknya hanya makan sayur-sayuran (mungkin mereka yakut dengan makanan lokal, 1 Korintus 8:7). Kita harus peka terhadap kurangnya pemahaman mereka dan menahan diri untuk tidak makan yang dianggap mereka kurang layak untuk dimakan. Memecah belah dapat dilaksanakan dengan mudah dimana dengan menerapkan kebebasan kita pada hati nurani orang lain. Iman tidak selalu mudah, karena kita semua akan memiliki iman yang lemah pada suatu saat. Jadi kita harus menghormati satu sama lain dari pada menghakimi satu sama lain.

Paulus menyimpulkan alasannya dengan memperlihatkan bahwa Allahlah sebagai hakim: Siapakah kamu untuk menghakimi hamba orang lain? Bagi tuannya sendiri dia berdiri atau jatuh.

Peran Penyuluh Agama

Salah satu jabatan fungsional di Kementerian Agama Republik Indonesia adalah penyuluh agama. Penyuluh agama merupakan ujung tombak pemerintah Kementerian Agama dalam menyampaikan pesan-pesan agama dan pesan dari program pemerintah. Penyuluh agama merupakan pembimbing umat beragama dalam pembinaan mental, akhlak, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 791 tahun 1985, penyuluh agama adalah pembimbing yang membantu umat beragama untuk dibina kejiwaannya, moral, dan ketaqwaan kepada Tuhan.

Keberadaan penyuluh agama dapat dipandang sebagai agen yang mampu membangun struktur sosial, hal ini dapat dilihat dari teori strukturalisasi. Melalui praktik/ tindakan yang berulang-ulang kegiatan penyuluh agama akan menjadi contoh dan aktor di masyarakat umum. Sebagai agen, penyuluh agama akan menumbuhkan rutinitas sehari-hari yang tidak hanya memberi rasa aman tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengelola kehidupan sosial mereka secara efektif.

Naskah akademik Kementerian Agama Republik Indonesia menguraikan tentang kemampuan dasar yang diperlukan oleh para penyuluh agama untuk dapat menjalankan

tugasnya secara efektif. Kemampuan dasar itu adalah: 1) Kemampuan untuk menggunakan dan menerapkan variabel-variabel dan isu-isu penting bagi vitalitas masyarakat (sebagaimana fungsinya dilakukan, misalnya isu demografus, masalah ekonomi, pelayanan manusia, lingkungan dan masalah lainnya) kemudian kemampuan memakai dan mempraktekkan variabel-variabel dalam memprioritaskan program perencanaan dan penyerahan proses aksi sosial. 2) rasa memiliki terhadap berbagai budaya, asumsi multi-budaya, norma, kepercayaan, dan nilai, atau keragaman budaya merupakan dari kesadaran, komitmen dan kemampuan. 3) Kapasitas untuk merencanakan, merancang, melaksanakan, mengevaluasi, menghitung dan memasarkan program penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup sasaran penyuluhan atau pemograman bidang penyuluhan. 4) Kapasitas untuk mengenali, memahami dan memfasilitasi peluang dan sumber daya yang diperlukan sebagai cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan masyarakat binaan (keterlibatan). 5) Menerapkan teknologi dan metode penyuluhan untuk mendukung program penyuluhan dalam membimbing perubahan perilaku kelompok sasaran penyuluhan, menguasai keterampilan berkomunikasi baik lisan dan tulisan. 6) Kapasitas untuk berinteraksi secara efektif dengan berbagai individu dan kelompok dalam rangka menjalin kerjasama, membangun jaringan dan menciptakan sistem yang dinamis. 7) Pengetahuan sejarah, filsafat dan karakteristik dari penyuluhan (pengetahuan tentang organisasi). 8) kemampuan untuk secara positif mempengaruhi individu, berbagai kelompok binaan atau pengelola organisasi penyuluh. 9) Kapasitas untuk menentukan struktur, mengatur proses, pengembangan, memantau sumber daya serta memimpin perubahan untuk mencapai hasil penyuluhan secara efisien dan efektif. 10) Kemampuan untuk menunjukkan perilaku yang mencerminkan kinerja penyuluh yang tinggi, etos kerja yang kuat, dan komitmen untuk pendidikan berkelanjutan sesuai visi, misi dan tujuan penyuluh untuk meningkatkan efektivitas individu dan organisasi (profesionalisme).

Berdasarkan uraian di atas, para penyuluh agama dapat berperan dalam menyelesaikan program moderasi beragama yang mendorong kerukunan umat beragama. Para penyuluh melakukan penyuluhan moderasi beragama kepada masyarakat binaan mereka masing-masing dengan bersikap secara moderat. Penyuluh harus merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan sebagai bagian dari penyuluhan mereka, serta memantau dan mengevaluasi program moderasi beragama.

Tantangan Program Moderasi Beragama di Kabupaten Toba

Tantangan yang didapatkan di lapangan dalam menyukseskan program moderasi beragama adalah masyarakat Kabupaten Toba yang beragama mayoritas masih tidak terbuka dengan keberadaan masyarakat yang beragama minoritas, hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Batak Toba yang Beragama Kristen masih menganggap bahwa tanah daerah mereka warisan dari nenek moyang mereka dan dipersiapkan untuk mereka bukan untuk masyarakat pendatang. Dari peristiwa tersebut pernah terjadi penolakan pembangunan masjid pada tahun 2010 di daerah Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba dimana penduduk melarang pembangunan dikarenakan melihat juga fenomena pembangunan gereja di daerah lain yang mengalami penolakan dikarenakan tersandung aturan daerah dan masyarakat beragama mayoritas tidak setuju ada pembangunan rumah ibadah masyarakat beragama minoritas. Namun dengan adanya musyawarah dan mufakat dari kedua belah pihak dan didampini tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah daerah maka pembangunan mesjiid terlaksana. Dari peristiwa tersebut dapat dikatakan sikap etnosentrime di masyarakat Kabupaten Toba masih terlabel pada pemikiran mereka.

Masyarakat Kabupaten Toba juga masih memiliki sifat kemauan belajar yang rendah terhadap pemahaman yang baru terkhususnya tentang moderasi beragama sehingga mereka sulit memberikan waktu dan ruang bagi para penyuluh agama untuk menyampaikan berbagai informasi seputar moderasi beragama. Masyarakat Kabupaten Toba juga umumnya mempunyai tingkat ekonomi yang kurang dimana mereka harus setiap hari untuk pergi bertani dan berladang untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan mereka sehari-hari. Hal ini membuat para penyuluh juga sulit untuk mengumpulkan masyarakat dalam melakukan sosialisasi moderasi beragama kepada masyarakat karena mereka lebih suka berladang atau bertani dibandingkan berkumpul untuk mendapatkan pengetahuan baru tanpa adanya uang atau imbalan dari pemberian waktu mereka.

Hambatan Program Moderasi Beragama di Kabupaten Toba

Hambatan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi pencapaian suatu tujuan. Hambatan membuat program dan rencana tidak berjalan dengan lancar. Program moderasi beragama juga mempunyai hambatan di tengah-tengah masyarakat dan hambatan ini bisa membuat program-program serta makna moderasi beragama tidak tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.

Hambatan-hambatan yang ditemukan penulis di dalam lapangan adalah pertama, kurangnya anggaran yang tersalurkan untuk program moderasi beragama di instansi Kementerian Agama daerah terkhususnya daerah Kabupaten Toba. Kurangnya anggaran

membuat program-program moderasi beragama tidak terlaksana di kementerian Agama Kabupaten Toba dan mengakibatkan masyarakat Kabupaten Toba tidak mengetahui moderasi beragama dengan baik. Hal ini sangat disayangkan terjadi, dimana kita mengetahui bahwa Kementerian Agama sedang besar-besarnya menggerakkan program moderasi ke seluruh bagian Indonesia namun karena penyaluran dana yang kurang baik ke daerah-daerah maka dapat dikatakan program moderasi beragama di daerah tidak berjalan dengan baik akibat kekurangan dana.

Hambatan kedua adalah kompetensi penyuluh-penyuluh agama Kabupaten Toba yang masih belum mengetahui dengan baik tentang konsep moderasi beragama, dimana mereka masih mendefinisikan moderasi beragama dengan doktrin agama yang mereka anut sehingga dapat menyebabkan pertentangan dengan pengertian yang sebenarnya. Kita ketahui bahwa moderasi beragama itu adalah pemikiran yang tidak berlebih-lebihan dan bersifat ditengah sehingga doktrin ajaran agama yang dianut harus tidak ditonjolkan. Dengan mengetahui konsep, isi dan pengertian moderasi beragama para penyuluh dapat mengayomi dan mengajarkan konsep moderasi beragama kepada masyarakat dengan baik dan efektif.

Selain harus meningkatkan kompetensi penyuluh tentang pengetahuan moderasi beragama hambatan yang lainnya terlihat dari masyarakat kabupaten Toba. Faktor ekonomi masyarakat membuat program moderasi beragama tidak tersalurkan kepada masyarakat dikarenakan masyarakat mengutamakan mencari uang seperti berladang, bertani dan berdagang daripada mengikuti pertemuan-pertemuan sosialisasi moderasi beragama, pelatihan moderasi beragama dan kegiatan lainnya. Untuk mendapatkan waktu mereka maka panitia pelaksana kegiatan harus memberikan feedback materi seperti uang transport, makanan dan hadiah lainnya. Hal ini dapat kita katakan bahwa dalam menjalankan program moderasi beragama diperlukan anggaran yang cukup dalam menyukseskan program moderasi beragama agar masyarakat tertarik dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat.

Strategi dalam Menyukseskan Program Modera Beragama

Menyukseskan program moderasi beragama harus memerlukan strategi agar program moderasi beragama, konsep dari moderasi beragama dan tujuan moderasi beragama tersalurkan kepada setiap pihak masyarakat Indonesia. Strategi dapat diartikan sebagai bentuk dari perencanaan yang terintegrasi dengan tujuan, kebijakan dan juga rangkaian dari suatu kesatuan yang utuh.

Melihat permasalahan yang ada di Kabupaten Toba maka Kampus Syalom IAKN Tarutung sebagai tempat rumah moderasi beragama di kabupaten Tapanuli utara mempunyai

tanggung jawab yang besar untuk berbagi ilmu tentang moderasi beragama kepada kementerian Agama Kabupaten Toba dengan menjalankan hubungan kerjasama yang baik dari kedua Instansi. Kampus Syalom IAKN Tarutung dapat memberikan fasilitas penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan moderasi beragama kepada Kementerian Agama Kabupaten Toba, pemerintah Kabupaten Toba, Instansi/ lembaga pemerintahan di Kabupaten Toba, para penyuluh Agama Kabupaten Toba dan kepada masyarakat Kabupaten Toba. Dosen-dosen yang sudah diberikan pelatihan pemahaman moderasi beragama dari Balai Diklat Keagamaan Medan akan berbagi ilmu kepada Kementerian Agama Kabupaten Toba khususnya para penyuluh Agama yang terjun langsung ke masyarakat binaan masing-masing sehingga para penyuluh Agama mempunyai pemahaman yang baik tentang moderasi beragama dan membagikan pemahaman tersebut kepada masyarakat. Dengan adanya penyuluhan moderasi beragama yang baik dan rutin kepada masyarakat Kabupaten Toba dapat menciptakan masyarakat kabupaten Toba yang saling menghormati perbedaan agama, budaya dan perbedaan-perbedaan lainnya.

Pelatihan maupun sosialisasi moderasi beragama harus menyertakan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, mereka harus dibekali dengan pemahaman moderasi beragama dan menjadikan mereka agen moderasi beragama. Para tokoh mempunyai pengaruh yang besar sebagai penyampai pesan moderasi beragama ditengah masyarakat sehingga dari pengaruh tersebut masyarakat dapat lebih memahami konsep moderasi beragama dan melakukannya di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Untuk melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh agama maka Kementerian Agama kabupaten Toba harus membangun relasi yang baik kepada para tokoh sehingga segala program dari kementerian Agama Toba dapat dihadiri oleh tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Pejabat-pejabat Kementerian Agama Kabupaten Toba juga dapat melakukan strategi untuk menyelesaikan program moderasi beragama yaitu dalam setiap kesempatan pertemuan, kegiatan atau undangan resmi pemerintah para pejabat dapat menyisipkan pesan-pesan moderasi beragama di setiap pidato atau arahan yang disampaikan sehingga masyarakat kabupaten Toba tidak buta akan konsep moderasi beragama.

Kementerian Agama pusat juga dapat memberikan anggaran yang cukup kepada setiap instansi Kementerian Agama di seluruh Indonesia sehingga segala program-program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya keterbatasan dana. Dengan adanya anggaran maka sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan moderasi beragama dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat dan masyarakat mengetahui pemahaman moderasi beragama sehingga terciptalah kehidupan masyarakat yang toleransi, aman nyaman dan tidak bersifat etnosentisme.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tantangan dan hambatan selalu ada dalam setiap program yang ingin dijalankan dan tantangan serta hambatan dapat membuat tujuan dari program tidak terealisasi dengan baik. Untuk menyelesaikan diperlukan strategi guna menyelesaikan tantangan dan hambatan yang menghalangi program yang akan dijalankan. Kementerian Agama Kabupaten Toba harus peka terhadap permasalahan tersebut sehingga dapat menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut. Dengan adanya kerjasama antara kementerian agama kabupaten Toba dengan IAKN Tarutung maka program moderasi beragama akan sukses terlaksana dan masyarakat Kabupaten Toba tidak buta lagi dengan pemahaman moderasi beragama. Masyarakat yang sadar akan moderasi beragama menciptakan masyarakat yang toleran, cinta akan kedamaian dan saling menghormati akan perbedaan yang ada.

DAFTAR REFERENSI

- Abror, M. (2020). Moderasi beragama dalam bingkai toleransi. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 137–148.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Ansori, M. H. (2022). Moderasi beragama sebagai pendekatan deradikalisasi agama dalam pendidikan. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 101–114. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v13i2.8702>
- Bakar, A. (2015). Konsep toleransi dan kebebasan beragama. *103.193.19.206*, 7(2), 123–131. <https://situswahab.wordpress.com>
- Fauzi, A., & Ramdhani, I. (2020). Urgensi pendidikan karakter berbasis moderasi beragama di sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 113–124.
- Hasan, M. (2021). Prinsip moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa. *Jurnal Muftadiin*, 7(2), 111–123. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/muftadii>
- Mubarok, H. (2021). Pendidikan multikultural dan moderasi beragama dalam membentuk karakter toleran siswa. *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 10(1), 55–68.
- Novianti, A., Sari, P., Ihut, H., Simamora, T., Dewi, H., Karina, E. D., & Sipahutar, M. A. (2022). Peningkatan kompetensi penyuluh agama di Kabupaten Toba melalui pelatihan komunikasi yang efektif dan efisien. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 229–239.
- Prakosa, P. (2022). Moderasi beragama: Praksis kerukunan antar umat beragama. *JIREH: Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity*, 4(1), 45–55.

- Selanno, S. (2022). Moderasi beragama dalam bingkai pendidikan agama Kristen kehidupan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(13), 528–536.
- Siahaya, J., Rinukti, N., Setiawan, H. L., Siahaya, C. J., & Sutiono, V. S. (2021). Menstimulasi sikap kerukunan dalam jemaat: Sebuah model moderasi beragama menurut Roma 14:1–4. *Kurios*, 7(2), 345–351.
- Situmeang, D. M., & Hutahaean, A. N. P. S. (2021). Mata guru roha sisean: Berpikir kritis dalam mengambil keputusan berdasarkan ungkapan Batak Toba dan Kristiani. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 239–246.
- Suratman, E., Muryati, M., Pakpahan, G. K. R., Setianto, Y., & Setyobekti, A. B. (2022). Moderasi beragama dalam perspektif hukum kasih. *Prosiding Pelita Bangsa*, 1(2), 81.
- Wahyudi, R. (2020). Moderasi beragama dan problem radikalisme di Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, 15(1), 45–62.
- Widodo, P. (2019). Moderasi agama dan pemahaman radikalisme di Indonesia. *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 15(5), 9–14.
- Zulhamdi. (2021). Konsep moderasi beragama dalam perspektif tafsir tematik. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 77–90.